



RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2019

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan A.I.S Nasution Nomor 2 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221723 Fax. (0536) 3224903
E-mail : subprogram.bpsdm@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu kepada arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Renja disusun dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kondisi exiting Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 serta pertimbangan kebutuhan tahun 2019.

Harapan kami Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dapat menunjang visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Palangka Raya,

2018

KEPALA BADAN

SRI WIDANARNI, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690212 198911 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 LANDASAN HUKUM 2

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018 5

 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
 RENSTRA..... 5

 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

 2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 15

 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 15

 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 16

 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 17

BAB IV PENUTUP 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yaitu “Kalteng maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”, yaitu pada misi ke-6 (enam) tentang Tata Kelola Pemerintahan.

Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia sumber daya aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dengan demikian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada RPJMD yang telah memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, selanjutnya PD menyusun Rencana Kerja (Renja PD) untuk satu tahun dengan pedoman Renstra yang sudah di susun, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Penyusunan Program di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan penyusunan Renja PD adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019. Sedangkan tujuan kegiatan penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah:

- a. Mengevaluasi terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya;
- b. Mengumpulkan rancangan/usulan program-program dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit dalam lingkup kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Memilih, memilah dan menelaah rancangan/usulan program-program dan kegiatan-kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas;
- d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2019 bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menuju Kalteng BERKAH.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2017 pada pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga sesuai dengan Review Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Capaian tersebut berdampak positif terhadap perkiraan capaian program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Tahun 2018.

Dalam tahun anggaran 2017, anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.34.599.513.899,- dari keseluruhan anggaran tahun 2017 tersebut telah terserap sebesar Rp.29.295.848.495,- atau terserap sebesar 81,33%, dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.26.506.260.000,- terealisasi sebesar Rp.21.202.594.596,- atau terserap sebesar 79,99%, dan belanja tidak langsung sebesar Rp.8.093.253.899,- terealisasi sebesar Rp.6.938.096.975,- atau terserap sebesar 85,73%. Secara garis besar realisasi anggaran Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Langsung	26.506.260.000,-	21.202.594.596,-	79,99%
2.	Belanja Tidak Langsung	8.093.253.899,-	6.938.096.975,-	85,73%
JUMLAH		34.599.513.899,-	29.295.848.495,-	81,33%

Adapun rincian penyerapan anggaran dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PAGU DANA	REAL KEUANGAN	
		(Rp)	Rp.	%
1	2	3	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,499,268,051	4,262,215,150	94.73%
	Penyediaan jasa surat menyurat	32,935,400	22,397,150	68.00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	695,562,917	610,563,750	87.78%
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15,000,000	15,000,000	100.00%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15,000,000	9,953,900	66.36%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,573,564,700	1,542,528,400	98.03%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37,953,000	33,337,000	87.84%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30,000,000	30,000,000	100.00%
	Penyediaan alat tulis kantor	72,958,900	55,296,350	75.79%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66,240,500	60,632,550	91.53%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28,525,000	27,720,000	97.18%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	654,440,000	640,044,000	97.80%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	464,523,000	463,230,000	99.72%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35,000,000	29,520,000	84.34%
	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	13,828,000	34.57%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	418,338,659	416,022,550	99.45%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	178,734,025	160,264,000	89.67%
	Pengembangan Buletin Kediklatan	140,491,950	131,877,500	93.87%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,296,857,723	6,239,453,696	99.09%
	Pembangunan gedung kantor	5,247,127,723	5,218,770,721	99.46%
	Pengadaan mebeleur	231,390,000	228,730,000	98.85%
	Pembangunan pagar, taman dan tempat paker	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	638,340,000	635,752,800	99.59%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80,000,000	79,945,175	99.93%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000	76,255,000	76.26%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	153,000,000		0.00%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	153,000,000	152,039,375	99.37%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220,878,200	214,991,850	97.34%
	Penilaian angka kredit	113,993,000	108,116,850	94.85%
	Masterplan	-	-	
	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	106,885,200	106,875,000	99.99%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	241,149,900	233,575,700	96.86%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	18,599,900	18,589,700	99.95%
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21,600,000	21,586,750	99.94%
	Penyusunan RKA-SKPD	65,000,000	63,459,375	97.63%
	Penyusunan LAKIP	20,000,000	19,052,450	95.26%
	Penyusunan renja SKPD	25,000,000	24,610,925	98.44%
	Laporan LKPJ dan LPPD	18,800,000	17,800,000	94.68%
	Inventarisasi	36,150,000	34,642,350	95.83%
	Penyusunan Laporan TEPPRA/SIMPPD	36,000,000	33,834,150	93.98%

NO.	URAIAN	PAGU DANA	REAL KEUANGAN	
		(Rp)	Rp.	%
6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	212,903,850	205,922,425	96.72%
	Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov Kalteng	162,900,000	162,450,325	99.72%
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu)	50,003,850	43,472,100	86.94%
7	Program Pendidikan Kedinasan	9,308,194,376	7,711,676,175	82.85%
	Pendidikan penjenjangan structural	8,907,350,000	7,345,575,100	82.47%
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	144,922,188	134,785,075	93.01%
	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	255,922,188	231,316,000	90.39%
8	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	107,000,000	105,713,700	98.80%
	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	107,000,000	105,713,700	98.80%
9	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	5,092,137,900	1,718,255,150	33.74%
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	-	-	-
	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	200,000,000	177,766,300	88.88%
	Diklat Keuangan Daerah	280,000,000	239,247,000	85.45%
	Diklat Perancangan Peraturan Perundang-undangan	1,890,525,000	17,976,100	0.95%
	Diklat Inovasi	210,000,000	179,196,200	85.33%
	Diklat Pranata Komputer	204,447,900	180,985,400	88.52%
	Diklat Satpol PP	1,727,165,000	431,229,250	24.97%
	Workshop Mentor	60,000,000	41,258,500	68.76%
	Workshop Coach	60,000,000	47,220,500	78.70%
	Workshop Penguji	60,000,000	40,683,500	67.81%
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,000	362,692,400	90.67%
10	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	374,870,000	358,751,375	95.70%
	Evaluasi Alumni pasca diklat	188,910,000	174,275,700	92.25%
	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	185,960,000	184,475,675	99.20%
	JUMLAH	26,506,260,000	21,050,555,221	79.42%

Dari anggaran Belanja Langsung yang tersedia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebesar Rp.26.506.260.000,-, yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp.21.050.555.221,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 79,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terdapat deviasi anggaran sebesar 20,58%. Deviasi anggaran yang terjadi disebabkan beberapa faktor:

1. Tidak tepenuhinya jumlah kuota peserta diklat dari Kabupaten/Kota disebabkan karena terjadi rasionalisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana anggaran untuk pengiriman peserta diklat dari Kabupaten/Kota dikurangi dari jumlah target awal yang sudah ditetapkan dalam APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Terdapat *Silpa* hasil lelang dan pelaksanaan kegiatan rutin kediklatan sebagai bentuk efisiensi anggaran di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun perincian deviasi penyerapan anggaran di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Penjenjangan Struktural Rp. 1.472.335.000,-
- b. Diklat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1.890.525.000,-
- c. Diklat Satpol PP Rp. 1.202.125.000,-
- d. *Silpa* hasil lelang dan kegiatan rutin Rp. 739.496.754,-

Terjadinya rasionalisasi anggaran pada anggaran kegiatan diklat Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut berimplikasi terhadap pengurangan jumlah kuota peserta diklat yang dikirimkan dan menyebabkan penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun secara keseluruhan target PAD BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

Adapun perincian capaian PAD di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	SOPD	Target Total (Rp)	Total	
			Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	825.000.000,00	865.400.000,00	104,90

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun capaian kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan			75%	80%	80%	85%	95%								
2	Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan			75%	80%	80%	85%	95%								
3	Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus post test			60%	65%	65%	70%	85%								
4	Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus post test			60%	65%	65%	70%	80%								
5	Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat			75%	80%	80%	85%	95%								
6	Persentase layanan terhadap kepuasan penyelenggaraan diklat			70%	75%	75%	80%	90%								
7	Jumlah perjanjian kerjasama diklat			6	8	9	10	14								

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan telah melalui berbagai proses yang dilaksanakan bersama antar bidang dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah melalui berbagai kajian mendalam dikaitkan dengan renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan ketika telah dijadikan dokumen PPAS dan DPA pada saatnya nanti bias dijadikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	2500 buah	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Lama penggunaan telepon, air, listrik, internet dan website	1 tahun	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Provinsi	Jumlah gedung yang diasuransikan	2 gedung	
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah kendaraan bermotor dinas/operasional selama setahun	5 unit	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi	Pengelolaan administrasi keuangan	1 tahun	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara	4 gedung	
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Provinsi	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	60 unit	
8	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi	Penggunaan alat tulis kantor	1 tahun	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	982 pak, 200 eksemplar dan 101.105 lembar	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara dan pengadaan generator	2 gedung dan 1 unit	

			listrik		
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	6 paket	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah koran dan majalah kantor	25 eksemplar	
14	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi	Jumlah rapat dan sosialisasi	35 kali	
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	80 orang/kali	
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	80 orang/kali	
17	Rujukan berobat PNS	Provinsi	Jumlah PNS yang melakukan pengobatan	3 orang	
18	Pengembangan Buletin Kediklatan	Provinsi	Jumlah buletin yang diterbitkan	2 buletin	
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pembangunan Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah pembangunan dilingkungan kantor dan asrama	1 paket	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor dinas/ operasional	2 unit	
3	Pengadaan Mebeleur	Provinsi	Jumlah pengadaan meubelair kelas dan asrama	4 paket	
4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah pemeliharaan kendaraan bermotor dinas/ operasional selama setahun	7 unit	
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang diperbaiki	4 unit	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Jumlah fasilitas kantor (AC dan generator listrik) yang terpelihara	100 unit	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Provinsi	Jumlah pakaian yang dibuat	255 stel	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Penilaian angka kredit	Provinsi	Jumlah penilaian angka	2 kali	

			kredit dalam setahun		
2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Provinsi	Jumlah pedoman kompetensi yang dibuat	3 pedoman	
3	Penjamin mutu diklat PMD	Provinsi	Pelaksanaan diklat yang berkualitas	1 tahun	
4	Re-akreditasi diklat	Provinsi	Jumlah sertifikat akreditasi BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	1 buah	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Provinsi	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	
3	Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah laporan RKA	2 laporan	
4	Penyusunan LAKIP	Provinsi	Jumlah laporan LAKIP	1 laporan	
5	Penyusunan Renja SKPD	Provinsi	Jumlah laporan renja	2 laporan	
6	Laporan LKPJ dan LPPD	Provinsi	Jumlah laporan penyerapan anggaran	4 laporan	
7	Inventarisasi	Provinsi	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	1 laporan	
8	Penyusunan Laporan TEPR/SIMPPD	Provinsi	Jumlah laporan inventarisasi BMD	1 laporan	
VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
1	Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov Kalteng	Provinsi	Jumlah sertifikat yang didaftarkan	600 lembar	
VII	Program Pendidikan Kedinasan				
1	Pendidikan penjenjangan struktural	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	480 Orang	
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Provinsi	Jumlah Diklat yang evaluasi	1 Tahun	
3	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	1 Tahun	
VIII	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan				
1	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	Provinsi	Jumlah laporan kediklatan	4 laporan	
2	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Provinsi	Layanan informasi publik atas penyelenggaraan diklat	1 Tahun	
3	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi	Jumlah buku yang tersusun selama 1 tahun	500 buku	

IX	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	160 orang		
2	Diklat penata laporan keuangan dan aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	80 orang		
3	Diklat Administrasi Kearsipan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	80 orang		
4	Diklat Tata Naskah Dinas	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
5	Diklat Pengelolaan Aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
6	Diklat Training Officer Course (TOC)	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
7	Diklat Keuangan Daerah	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
8	Diklat satpol PP	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
9	Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
10	Diklat Dasar Manajemen Bencana	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
11	Diklat Revolusi Mental	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
12	Diklat Bela Negara Bagi Aparatur Sipil Negara	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
13	Workshop Inovasi	Provinsi	Jumlah PNS dan Non-PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
14	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
15	Diklat Auditor	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
16	Diklat Rencana dan Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD)	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
17	Diklat RPJMD	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
18	Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
19	Diklat Pengelolaan Barang dan Aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang		
20	Diklat Penyuluh Pertanian	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang		
21	Diklat Pengawas Perikanan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang		

22	Diklat Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang	
23	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI) bagi pengawas	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	30 orang	
24	Workshop Mentor	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
25	Workshop Coach	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
26	Workshop Penguji	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
27	Workshop Penyusunan RENJA	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
28	Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	40 Orang	
29	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa atau Kelurahan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	40 Orang	
X	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				
1	Evaluasi Alumni Pasca Diklat	Provinsi	Jumlah alumni diklat yang didata	75 orang/daerah	
2	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	Provinsi	Jumlah alumni diklat yang lolos seleksi	5 peserta	
XI	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur				
1	Uji kompetensi dan sertifikasi	Provinsi	Jumlah sertifikat PNS dan Non-PNS yang melakukan uji kompetensi selama setahun	120 buah	
2	Penyusunan perangkat pembelajaran	Provinsi	Jumlah pedoman penyelenggaraan diklat	30 buku	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi di Indonesia adalah pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Vital Birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Amanah tugas yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan secara profesional dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap pengabdian yang kokoh terhadap bangsa dan Negara serta kecintaannya pada eksistensi persatuan dan kesatuan.

Aparatur pemerintah menempati posisi yang amat strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan pada berbagai fungsi yang terinternalisasi di dalamnya, yakni fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja aparatur akan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan, sehingga berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kinerja dimaksud harus menjadi agenda kebijakan utama, terlebih lagi bagi Pemerintah Daerah.

Kinerja aparatur pemerintah sangat terkait dengan aspek-aspek kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja serta kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan yang tepat mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dimana dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan standarisasi kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur serta melaksanakan sistem komputerisasi administrasi kediklatan.

Program yang dilaksanakan meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Kedinasan, Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Pengembangan Aparatur yang merupakan acuan bagi sub bidang/bagian dalam menjalankan tupoksinya.

Sebagaimana diketahui, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu program/kegiatan pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Telaahan terhadap kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, Telaahan terhadap kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu program /kegiatan akhir pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan telaahan dan analisis lebih lanjut yang dapat dilihat dari nilai capaian kelompok indikator kinerja.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing global melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara berbasis kompetensi di Kalimantan Tengah	1. Meningkatnya Aparatur Peserta Diklat yang Profesional dan Kompeten	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	75%	80%	80%	85%	95%
			Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	75%	80%	80%	85%	95%
			Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus post test	60%	65%	65%	70%	85%
			Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus post test	60%	65%	65%	70%	80%
			Pesentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat	75%	80%	80%	85%	95%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Diklat	Pesentase layanan terhadap kepuasan penyelenggaraan diklat	70%	75%	75%	80%	90%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program dan kegiatan pada Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 memuat kegiatan lanjutan

tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan program dan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8	Penyediaan alat tulis kantor
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12	Penyediaan peralatan rumah tangga
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14	Penyediaan makanan dan minuman
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
17	Rujukan berobat PNS
18	Pengembangan Buletin Kediklatan
19	Rapat Koordinasi Pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pembangunan Gedung Kantor
2	Pengadaan Mebeleur
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7	Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Kantor

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Penilaian angka kredit
2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
3	Penjamin mutu diklat PMD
4	Re-akreditasi diklat
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3	Penyusunan RKA-SKPD
4	Penyusunan LAKIP
5	Penyusunan Renja SKPD
6	Penyusunan Laporan TEPPRA/SIMPDP
7	Laporan LKJP dan LPPD
8	Inventarisasi Barang Milik Daerah
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)
VII	Program Pendidikan Kedinasan
1	Pendidikan penjenjangan struktural
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
3	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
VIII	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan
1	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan
2	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan
4	Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Kediklatan Bebas Website

IX	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
2	Diklat Pranata Komputer
3	Diklat Dasar Manajemen Bencana
4	Diklat Revolusi Mental
5	Workshop Inovasi
6	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)
7	Diklat Bagi Camat Non Pemerintahan
8	Lokakarya/Workshop untuk Anggota DPRD
9	Diklat Manajemen PNS
10	Diklat Rekayasa Trafik
11	Diklat Keprotokolan
12	Diklat Public Speaking
13	Diklat Penyusunan RENJA
14	Diklat Penyusunan LKIP
15	Diklat Pengelolaan Barang dan Aset
16	Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kediklatan
17	Diklat Substansi Kepemimpinan Widyaiswara
18	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
19	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Diklat Perpustakaan bagi SMA/SMK
22	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
23	Diklat bagi Calon Kepala sekolah SMA/SMK
24	Diklat Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
25	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA/SMK
26	Workshop Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
27	Workshop Revolusi Mental
28	Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Kapsitas Damang Kepala adat se-Kalimantan Tengah
X	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
1	Evaluasi Alumni Pasca Diklat
2	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat

XI	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur
1	Uji kompetensi dan sertifikasi
2	Penyusunan perangkat pembelajaran
3	Pengelolaan Sertifikasi Aparatur Manajerial dan Teknis

Program dan kegiatan mengalami perubahan memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan program dan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas, hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel rencana program dan kegiatan SKPD pada Renja SKPD Tahun 2019 berikut :

BPSPDM Provinsi Kalimantan Tengah

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA SKPD: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.396.067.500,00				4.856.107.500,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.500 surat	25.000.000,00	APBD		2.500 surat	25.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemakaian Telepon selama 1 tahun,	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	987.200.000,00	APBD		1 Tahun	987.200.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah gedung yang diasuransikan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Gedung	15.000.000,00	APBD		2 Gedung	15.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya tanggungan pajak kendaraan bermotor dinas/ operasional	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Unit	8.000.000,00	APBD		6 Unit	10.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	1.723.907.500,00	APBD		1 Tahun	1.723.907.500,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 Bangunan/Gedung	40.000.000,00	APBD		4 Bangunan/Gedung	40.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	60 Unit	50.000.000,00	APBD		60 Unit	50.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penggunaan alat tulis kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	50.000.000,00	APBD		1 Tahun	50.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Jenis	66.000.000,00	APBD		3 Jenis	66.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Gedung	460.960.000,00	APBD		1 Tahun	400.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Paket	708.000.000,00	APBD		3 Paket	550.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Paket	523.000.000,00	APBD		1 Paket	200.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan majalah kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	25 Eksemplar	35.000.000,00	APBD		25 Eksemplar	35.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan sosialisasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	35 Kali	45.000.000,00	APBD		35 Kali	45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80 Orang/Kali	350.000.000,00	APBD		80 Orang/Kali	350.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80 Orang/Kali	100.000.000,00	APBD		80 Orang/Kali	100.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah PNS yang melakukan pengobatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Orang	25.000.000,00	APBD		2 Orang	25.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.51	Pengembangan Buletin Kediklatan	Jumlah buletin yang diterbitkan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Buletin	84.000.000,00	APBD		2 Buletin	84.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 1.72	Rapat Koordinasi Pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah	Jumlah rapat koordinasi BKD/ BKPSDM se-Kalimantan Tengah yang diselenggarakan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 kali	100.000.000,00	APBD		4 kali	100.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.619.119.750,00				9.301.500.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan dilingkungan kantor dan asrama	KOTA PALANGKA RAYA	5 Paket	7.517.619.750,00	APBD		3 Paket	8.000.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair kelas dan asrama	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Paket	400.000.000,00	APBD		3 Paket	600.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	100.000.000,00	APBD		1 Tahun	100.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan bermotor dinas/ operasional selama setahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	100.000.000,00	APBD		1 Tahun	100.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor dan asrama yang diperbaiki	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	50.000.000,00	APBD		1 Tahun	50.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah fasilitas kantor (AC, generator listrik dll) yang terpelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	151.500.000,00	APBD		1 Tahun	151.500.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 2.195	Rehabilitasi/ Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Gedung	300.000.000,00	APBD		2 Gedung	300.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				200.000.000,00				200.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibuat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	200 Stel	200.000.000,00	APBD		1 Paket	200.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				646.193.000,00				561.193.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 5.58	Penilaian angka kredit	Jumlah penilaian angka kredit dalam setahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Kali	121.193.000,00	APBD		2 Kali	121.193.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 5.124	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Jumlah pedoman kompetensi yang dibuat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Pedoman	225.000.000,00	APBD		1 Tahun	225.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 5.127	Penjamin Mutu Diklat PMD	Pelaksanaan diklat yang berkualitas	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	125.000.000,00	APBD		1 Tahun	125.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 5.139	Re Akreditasi Diklat	Jumlah sertifikat akreditasi BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	95 Point	175.000.000,00	APBD		1 Tahun	90.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				274.000.000,00				274.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Laporan	19.000.000,00	APBD		2 Laporan	19.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	22.000.000,00	APBD		1 Laporan	22.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.6	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah laporan RKA	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Laporan	66.000.000,00	APBD		2 Laporan	66.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.14	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan LAKIP	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	14.000.000,00	APBD		1 Laporan	14.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah laporan renja	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	28.000.000,00	APBD		1 Laporan	28.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.33	Penyusunan laporan TEPRASIMPPD	Jumlah laporan penyerapan anggaran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 Laporan	30.000.000,00	APBD		4 Laporan	30.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	20.000.000,00	APBD		1 Laporan	20.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.51	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi BMD	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	35.000.000,00	APBD		1 Laporan	35.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 6.97	mMonitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah laporan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 Laporan	40.000.000,00	APBD		4 Laporan	40.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 15	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				12.227.752.000,00				4.430.200.026,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	245 Orang	2.034.552.000,00	APBD		245 Orang	1.000.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.18	Diklat Pranata Komputer	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Orang	400.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.24	Diklat Dasar Manajemen Bencana	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.25	Diklat Revolusi Mental	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.27	Workshop Inovasi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	51.800.000,00	APBD		1 Tahun	51.800.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.29	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	160 Peserta	3.378.400.000,00	APBD		1 Tahun	3.378.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 15.30	Diklat Bagi Camat Non - Pemerintahan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	860.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.31	Lokakarya/ Workshop untuk Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti workshop	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	420 Peserta	319.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.32	Diklat Manajemen PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.33	Diklat Rekayasa Trafik	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.34	Diklat Keprotokolan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	420.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.35	Diklat Public Speaking	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.36	Diklat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.37	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.38	Diklat Pengelolaan Barang dan Aset	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.39	Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kediklatan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	150.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.40	Diklat Subtansi Kepemimpinan Widyaiswara	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	200.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.41	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	140.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.42	Diklat Pengelola Koperasi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.43	Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.44	Diklat Perpustakaan Bagi SMA/ SMK	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.45	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	210.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.46	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang mengikuti orientasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Daerah	300.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 15.47	Diklat Bagi Calon Kepala Sekolah SMA/ SMK	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	300.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.48	Diklat Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	350.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.49	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA/ SMK	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	350.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.50	Workshop Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	140.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.51	Workshop Revolusi Mental	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	103.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.52	Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah	Jumlah Damang Kepala Adat yang mengikuti bimtek	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 Peserta	211.000.000,00	APBD		1 Tahun	1,00
4.04 - 4.4.0101 - 16	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				2.181.000.000,00				681.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 16.1	Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat Manajerial	Jumlah alumni diklat yang didata	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75 Orang/ Daerah	181.000.000,00	APBD		1 Tahun	181.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 16.3	Kompetensi Inovasi Pasca Diklat	Jumlah alumni diklat yang lolos seleksi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Peserta	2.000.000.000,00	APBD		5 Peserta	500.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 17	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				203.625.000,00				203.625.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 17.37	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)	Jumlah sertifikat yang didaftarkan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	885 Buah	203.625.000,00	APBD		1 Tahun	203.625.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 18	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan				478.127.750,00				478.127.750,00
4.04 - 4.4.0101 - 18.31	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	Jumlah laporan kediklatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 Laporan	83.000.000,00	APBD		4 Laporan	83.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 18.32	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Layanan informasi publik atas penyelenggaraan diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	124.538.750,00	APBD		1 Tahun	124.538.750,00
4.04 - 4.4.0101 - 18.33	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah buku yang tersusun selama 1 tahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	500 buku	150.000.000,00	APBD		500 buku	150.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 18.34	Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Kediklatan Berbasis Website	Jumlah informasi pelaksanaan kegiatan diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	49 informasi	120.589.000,00	APBD		1 Tahun	120.589.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 19	Program Pendidikan Kedinasan				10.949.840.000,00				10.535.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 19.2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	480 Peserta	10.414.840.000,00	APBD		450 Peserta	10.000.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 19.3	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Jumlah diklat yang evaluasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	49 Diklat	185.000.000,00	APBD		49 Diklat	185.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 19.6	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	350.000.000,00	APBD		1 Tahun	350.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 20	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur				565.000.000,00				565.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 20.1	Uji Kompetensi dan Sertifikasi	Jumlah sertifikat PNS dan Non-PNS yang melakukan uji kompetensi selama setahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	315.000.000,00	APBD		1 Tahun	315.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 20.2	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	Jumlah pedoman penyelenggaraan diklat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	200.000.000,00	APBD		1 Tahun	200.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 20.3	Pengelolaan Sertifikasi Aparatur Manajerial dan Teknis	Data pengelolaan sertifikasi aparatur manajerial dan teknis	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	50.000.000,00	APBD		1 Tahun	50.000.000,00
	Jumlah				41.740.725.000,00				32.085.753.276,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah